

ABSTRAK

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.PEDOMAN.MENCABUT

NOMOR:18

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan pembangunan Kabupaten Bintan diperlukan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan pelaksanaannya dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, akuntabel dan manfaat bagi masyarakat

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Perpres No.16 Tahun 2018; Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; PerLKPBJP NO.15 Tahun 2018; PerLKPBJP NO.19 Tahun 2019; PerLKPBJP NO.3 Tahun 2021; PerLKPBJP NO.5 Tahun 2021; PerLKPBJP NO.9 Tahun 2021; PerLKPBJP NO.10 Tahun 2021; PerLKPBJP NO.12 Tahun 2021; Perda No.4 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pada Kegiatan Pembangunan, Pejabat Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD, Dokumen Pertanggung Jawaban Pengadaan Barang/Jasa, Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, Ketentuan Sanksi, Ketentuan Peralihan,Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini MENCABUT [PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN](#), PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATANPEMBANGUNAN KABUPATEN BINTAN Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Maret 2022 - Penjelasan : 0 hlm.